



PERAN BELANJA PEMERINTAH DAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA

Roosemarina Anggraini Rambe Ratu Eva Febriani

Abstract. *Sumatra is the driving force for the economy in Indonesia after Java. Compared to 4 other regions in Indonesia, apart from Java, the average economic growth in Sumatra is more stable. However, the contribution of GRDP of districts and cities in Sumatra to Indonesia has decreased, which indicates that the economic strength of Sumatra is declining. This study aims to analyze the effect of government spending, local taxes, and regional splitting on the economic growth of districts and cities in Sumatra. This study uses secondary data obtained from BPS and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the form of panel data, with 154 districts and cities in Sumatra during 2011-2016. The analysis method used is panel data regression. The results showed that the best regression model produced was the Fixed Effect Model. With the fixed effect model, it is found that government spending and local taxes have a significant positive effect on the economic growth of districts and cities in Sumatra. Meanwhile, for the regional split status variable, it is known that the blooming districts and cities have lower economic growth. The results of this research imply that local governments should allocate expenditure properly and strive for more optimal district/city tax collection through tax extensification so that the district and city economies can grow higher. On the other hand, the government is expected to evaluate the division of districts and cities because regional expansion did not promote economic growth during the research period.*

Keywords: *Economic Growth, Government Spending, Tax, Regional Split, Panel Regression.*

©2020 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan basis dari peningkatan kesejahteraan yang merupakan dampak nyata dari kebijakan pembangunan dari pemerintah yang diimplementasikan dalam berbagai rupa kebijakan. Pada perkembangannya, Indonesia telah melewati beberapa tahapan awal pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi dalam 10 tahun terakhir.

Sumatera merupakan penggerak perekonomian di Indonesia setelah Jawa. Dibandingkan dengan Jawa, kemajuan ekonomi Sumatera lebih lambat, karena pusat industri Indonesia masih berada di pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, dibandingkan dengan 4 *region* lainnya di Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta *region* Papua dan Maluku), pertumbuhan ekonomi rata-rata di

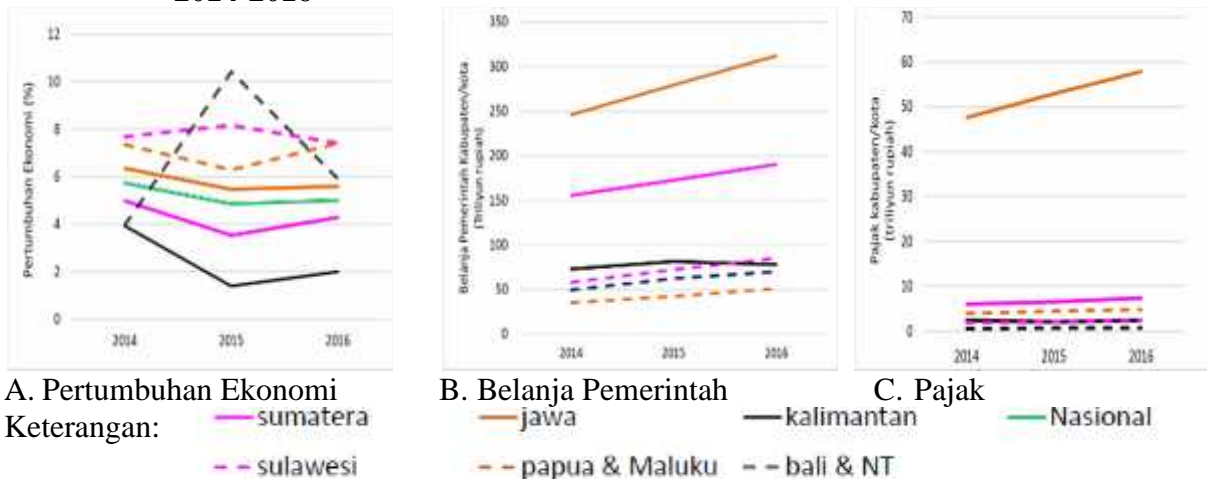
Roosemarina Anggraini Rambe (✉)
Universitas Bengkulu
Email : roosemarina.rambe@unib.ac.id

Ratu Eva Febriani
Universitas Bengkulu
Email : ratuevafebriani@unib.ac.id

Sumatera relatif rendah namun stabil. Bahkan pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten dan kota di Sumatera lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional.. Hal ini ditunjukkan dalam Gambar 1.

Dengan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang stabil namun rendah, kontribusi PDRB kabupaten dan kota di Sumatera terhadap Indonesia terus mengalami penurunan, yang mengindikasikan menurunnya kekuatan perekonomian Sumatera. Di Indonesia, perekonomian Sumatera memberikan kontribusi PDRB terbesar kedua setelah Jawa. pada tahun 2015, *share* PDRB di Jawa adalah 58,3%, yang disusul oleh Sumatera sebesar 22,2% Namun *share* PDRB Sumatera sedikit menurun di tahun 2016, menjadi 22,02%. (BPS, 2020). Penurunan ini mengindikasikan kekuatan perekonomian Sumatera di Indonesia sedikit menurun. Untuk itu perlu dianalisis pertumbuhan ekonomi dan faktor determinannya. Jika diketahui faktor determinan pertumbuhan ekonomi, dan bisa diimplementasikan, maka peluang pertumbuhan ekonomi Sumatera yang lebih besar terbuka lebar.

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota di Enam Region di Indonesia Tahun 2014-2016



Sumber: BPS Dan DJPK Kementerian Keuangan RI

Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta menjaga tingkat inflasi, maka pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter. Namun harmonisasi dari penerapan kedua kebijakan ini belum sepenuhnya optimal sehingga terkesan dampak kebijakan moneter tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi belum bisa mendorong peningkatan investasi secara berarti. Oleh karenanya, pemerintah lebih fokus pada kebijakan fiskal sebagai instrumen dalam mengelola perekonomian.

Pengelolaan anggaran pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah terjadinya krisis pada tahun 1997, dan ini sangat dirasakan terutama di negara-negara berkembang. Kebijakan fiskal yang meliputi sisi penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah, dikelola sedemikian rupa agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang optimal. Dampak dari peran pemerintah terhadap perekonomian diindikasikan melalui



pengaruh pajak dan kebijakan pengeluaran pemerintah pada berbagai indikator utama makroekonomi.

Pajak dan pengeluaran pemerintah berperan penting dalam mendukung dan menciptakan kestabilan perekonomian nasional. Sejalan dengan pemikiran aliran Keynes, intervensi pemerintah melalui pengeluaran akan menstimulus permintaan agregat yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ogundipe & Oluwatobi, 2013). Grafik 1B dan 1C memberikan gambaran perkembangan total belanja pemerintah kabupaten dan kota dan total pajak kabupaten dan kota antar region di Indonesia. Dari Grafik tersebut terlihat bahwa total belanja pemerintah kabupaten dan kota dan total pajak kabupaten dan kota di Sumatera lebih rendah dari Jawa, namun masih lebih tinggi dari 4 region lain di Indonesia. Hal ini mengindikasikan belanja pemerintah dan pajak memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, selain melalui instrumen keuangan daerah, juga bisa berasal dari peraturan dan kebijakan yang diambil. UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang membuka keran perkembangan pemekaran wilayah di Indonesia juga memiliki peran penting dalam upaya menguatkan pertumbuhan ekonomi. Dari 6 region di Indonesia, pemekaran kabupaten dan kota terbanyak terdapat di Sumatera, dengan munculnya 21 kabupaten dan kota baru, yang disusul oleh Sulawesi (19) dan region Papua dan Maluku (18). Pemekaran kabupaten dan kota ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang tercermin dari adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan pemekaran terbanyak di Sumatera, seharusnya berdampak baik pada perekonomian kabupaten dan kota di Sumatera.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah, pajak daerah dan pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera.

LANDASAN TEORI

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari proses aktivitas perekonomian yang akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat pada satu periode tertentu di suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari permintaan agregat (AD) dan atau dari sisi penawaran agregat (AS). Dari aspek permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan permintaan dalam perekonomian. Sedangkan dari aspek penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi dilihat dari aspek produksi. Dalam perkembangannya, muncul berbagai teori pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan teori klasik, pertumbuhan ekonomi terjadi dengan mengasumsikan adanya ekonomi persaingan sempurna, melalui "*invisible hand*" maka *output* nasional akan dimaksimalkan. Menurut pandangan ini, akumulasi modal merupakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mobilisasi tabungan untuk menghasilkan modal yang memadai bagi investasi, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2015). Hal lain yang digagas oleh pemikir klasik adalah doktrin "*trickle-down*", yang mana ini menjelaskan bagaimana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi semua masyarakat secara adil.

Sementara dari pandangan teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi akan tercapai secara maksimal dengan memanfaatkan akumulasi modal (investasi fisik) dan teknologi. Dengan memungkinkan terjadinya substitusi faktor, pengurangan pengembalian modal,



dan perubahan teknis di lingkungan perusahaan pengambil harga. Dengan menggunakan kerangka fungsi produksi, pemikir aliran neoklasik umumnya memprediksi bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita jangka panjang tidak bergantung pada tingkat tabungan, tetapi hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknis. Perubahan tingkat tabungan hanya memiliki efek sementara pada pertumbuhan seiring dengan penyesuaian ekonomi dari satu tingkat pendapatan per kapita pada kondisi mapan ke tingkat yang lain. Dalam teori ini output berasal dari satu atau lebih dari tiga faktor berikut: 1). peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan pendidikan); 2). peningkatan modal (melalui tabungan dan investasi); dan 3). peningkatan teknologi.

Selain dari teori pertumbuhan diatas, ada juga teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen merupakan model pertumbuhan yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa bergantung pada perubahan eksogen dalam teknologi atau populasi. Dalam model pertumbuhan ini, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan ada empat metode dasar dengan rute yang berbeda (Myles,2000), yaitu: (1) model AK, diasumsikan bahwa modal satu-satunya input produksi dan memiliki skala hasil konstan. Dengan asumsi ini, maka fungsi produksi adalah $Y = AK$. Output akan meningkat pada tingkat yang sama dengan investasi bersih pada modal. Model ini meski sederhana, namun memiliki kekurangan karena mengabaikan tenaga kerja sebagai faktor penting dalam produksi; (2) Penyesuaian peningkatan modal dengan pertumbuhan yang sama pada input lainnya. Dalam jalur ini, modal manusia lebih dipertimbangkan menjadi input modal kedua dibandingkan penggunaan tenaga kerja mentah atau yang tidak terampil. Dengan demikian, melakukan investasi pada sumber daya manusia seperti pelatihan dan pendidikan akan lebih produktif karena akan meningkatkan modal manusia (*human capital*) yang mendorong produksi lebih baik. Jika fungsi produksi *constant return to scale* pada modal manusia dan modal fisik bergabung bersama, maka investasi dikeduanya akan meningkatkan output tanpa batas; (3) pengasumsian bahwa output bergantung pada penggunaan tenaga kerja dan input lainnya. Peningkatan produksi dengan melakukan ekspansi input mencegah penggunaan salah satu input lebih besar daripada input tenaga kerja oleh karenanya peningkatan teknologi akan menjadi pengenalan input baru tanpa membuat input lama terbuang (Romer, 1990). Selain itu, peningkatan teknologi akan meningkatkan kualitas dari input, dengan peningkatan input yang lebih baik maka produksi akan lebih produktif; dan (4) asumsi bahwa ada eksternalitas antar perusahaan. Investasi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerjanya melalui pengembangan pengetahuan dan teknik baru sangat diperlukan. Namun, peningkatan pengetahuan merupakan barang publik, sehingga investasi dan pembelajaran oleh satu perusahaan akan mengalir ke perusahaan lainnya juga. Hal ini yang menentukan tingkat pengetahuan, sehingga produktifitas tenaga kerja bergantung pada stok modal agregat dalam perekonomian. Penurunan tingkat pengembalian modal untuk satu perusahaan (jumlah tenaga kerja tetap) akan diwujudkan ke dalam pengembalian konstan untuk perekonomian.

Belanja Pemerintah

Corak pembangunan dan perekonomian di negara berkembang dipengaruhi oleh peran dari pemerintah. Pengaruh yang diberikan oleh pemerintah sehingga memberikan corak dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi dilakukan melalui pelaksanaan fungsi dasar pemerintah yaitu alokasi dan distribusi pengeluaran pemerintah di daerah (Adisasmita, 2011). Dengan kata lain, indikator kegiatan



pemerintah ditunjukkan oleh aktivitas belanja pemerintah. Untuk meningkatkan penyediaan layanan publik oleh pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah membutuhkan anggaran yang lebih besar sehingga semakin besar kegiatan pemerintah maka semakin besar juga belanja pemerintah yang diperlukan.

Belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari perkembangannya, belanja pemerintah mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun dalam berbagai sistem perekonomian (Suparmoko, 2013). Sebagaimana yang dikemukakan oleh *Wagner's law*, sesungguhnya perkembangan perekonomian yang memuat hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan lainnya yang membuat perekonomian menjadi lebih kompleks, akan mendorong peran pemerintah yang lebih besar dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Oleh karenanya, belanja pemerintah umumnya akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian. Wagner memprediksi bahwa pengembangan industri ekonomi akan diikuti oleh peningkatan belanja pemerintah (Ighodaro dan Oriakhi, 2010). Dengan demikian, peranan pemerintah dalam perekonomian juga selalu meningkat relatif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi yang digambarkan dalam PDB suatu negara.

Peningkatan belanja pemerintah dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah. Dengan semakin besarnya belanja pemerintah maka kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi penyediaannya oleh sektor swasta dapat dinikmati melalui penyediaannya oleh pemerintah. Namun, kecenderungan peningkatan belanja pemerintah ini tidak serta merta berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah yang tidak tepat. Apabila alokasi belanja pemerintah tidak menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat, maka tidak akan terjadi *multiplier effect* yang positif pada perekonomian. Selain itu belanja pemerintah rentan dengan pemborosan dan inefisiensi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengutamakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya diberbagai wilayah agar pembangunan wilayah bisa berjalan melalui perencanaan anggaran yang tepat guna. Belanja yang tidak terencana dan tidak terkendali dengan baik akan menjadi sumber inefisiensi dan pemborosan uang negara yang sangat merugikan masyarakat (Mahmudi, 2010).

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Suparmoko, 2013):

1. Pengeluaran *self liquidating* sebagian atau seluruhnya
Pemerintah akan mendapatkan kembali pembayaran dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang disediakan melalui belanja pemerintah.
2. Pengeluaran reproduktif
Pengeluaran pemerintah diarahkan pada kegiatan yang mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sehingga penghasilan masyarakat meningkat. Dengan adanya peningkatan penghasilan pada masyarakat maka pemerintah dapat menerima pendapatan yang lebih besar melalui penetapan nilai pajak.
3. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif
Pengeluaran pemerintah langsung diarahkan pada peningkatan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan objek-objek pariwisata, taman kota, dan sebagainya.



4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang.

Sementara itu, dalam hal penggunaan belanja pemerintah, Permendagri No 13/2006 pasal 36 mengklasifikasikan belanja pemerintah menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pajak adalah instrumen penting dalam menjalankan perekonomian. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal, yaitu mengatur lalu lintas pergerakan ekonomi dalam masyarakat. Pada saat ekonomi tumbuh terlalu cepat maka pemerintah melakukan pengetatan penarikan pajak (kebijakan kontraktif), sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi berjalan lambat maka pemerintah akan melakukan pelonggaran tarif pajak (kebijakan ekspansif). Peningkatan peran pajak berimplikasi penting karena pajak berkaitan dengan pendapatan disposibel yang berhubungan dengan angka pengganda perekonomian yang artinya nanti akan berpengaruh terhadap iklim investasi (Myles, 2000).

Ada beberapa cara pajak dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) pajak yang dibebankan kepada individu dan perusahaan akan menimbulkan disinsentif bagi dunia usaha apabila tingkat pengembalian untuk tabungan, upah, dan investasi terlalu kecil akibat dikenakan pajak yang sangat besar, sehingga kegiatan produksi menjadi berjalan lambat; (2) timbul kecenderungan penurunan inovasi dan kegiatan kewirausahaan akibat adanya pengenaan pajak atas bisnis dan pendapatan investasi perorangan dan keuntungan modal; (3) diskriminasi pajak terkait barang dan jasa yang berbeda dapat menyebabkan timbulnya *deadweight losses* (DWL); (4) penerapan pajak tertentu seperti pajak yang dikenakan pada transaksi akan menghalangi orang untuk berpindah investasi atau bertukar aset dengan cara lain; (5) Pajak yang digunakan untuk membiayai program kesejahteraan dapat mengurangi insentif kerja, insentif berlatih atau memperoleh promosi, dan insentif untuk menabung (Booth, 2016).

Penerapan pajak dengan rasio tinggi yang akan mengarah pada PDB yang tinggi menghadirkan perdebatan, ada yang mendukung namun ada pula yang menentang. Di satu sisi, pajak yang lebih tinggi akan mendistorsi insentif bagi individu, sehingga penawaran tenaga kerja akan berkurang atau bagi perusahaan akan menurunkan minat untuk memproduksi lebih banyak. Di sisi lain, pajak yang lebih tinggi akan menyediakan sumber pendanaan bagi pemerintah untuk berinvestasi pada sektor potensial, misalnya; perbaikan infrastruktur, pendidikan atau pembangunan sumber daya, yang kesemuanya ini dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian (Mcnabb, 2018). Peran pajak dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah melalui individu sebagaimana teori pertumbuhan yang dikembangkan oleh Solow (1956) dan Swan (1956) atau model pertumbuhan neoklasik; perubahan tarif pajak dalam model pertumbuhan neoklasik dapat menyebabkan pergeseran hanya di jalur pertumbuhan pada saat kondisi-mapan, model tidak memungkinkan untuk menilai dampak kebijakan fiskal pada pertumbuhan jangka panjang (kondisi-mapan). Namun, model pertumbuhan yang ditawarkan dalam kajian Barro (1990), King and Rebelo (1990) dan Mendoza, Milesi-Ferretti dan Asea (1997) agak lebih tepat. King dan Rebelo (1990) melakukan investigasi pengaruh peningkatan tarif pajak *output* yang diterapkan



dengan besaran sama disemua sektor, menemukan bahwa meskipun secara kuantitatif pajak mempengaruhi tingkat pertumbuhan, namun besaran pengaruhnya tergantung pada produksi dan struktur pajak. Pertumbuhan endogen model Mendoza et al. (1997) mempertimbangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dari tarif pajak marjinal atas modal manusia dan modal fisik serta konsumsi. Prediksi model menunjukkan bahwa pajak konsumsi mempengaruhi tingkat pengembalian bersih setelah pajak atas modal fisik hanya saja secara tidak langsung, yaitu melalui pilihan waktu kerja atau waktu luang, yang pada gilirannya berdampak pada rasio modal terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam produksi. Selain melalui modal fisik atau modal manusia, pajak dapat menyebabkan distorsi pada pertumbuhan ekonomi melalui jalur konsumsi, hasilnya tidak jauh berbeda meskipun tingkatnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pajak penghasilan pribadi atau perusahaan.

Penelitian Terdahulu

Banyak studi yang mengkaji mengenai pertumbuhan ekonomi dari berbagai perspektif. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan pembangunan pada suatu negara atau daerah. Kebijakan pemerintah yang efektif dalam pembangunan akan mendorong ekonomi tumbuh, dan ini mencerminkan peningkatan kemakmuran masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dari dua sisi yang berbeda yaitu dari sisi penerimaan dan dari sisi pengeluaran. Instrumen kebijakan yang digunakan dari sisi pengeluaran berupa konsumsi pemerintah atau dikenal juga dengan belanja pemerintah. Sementara dari sisi penerimaan dapat dilakukan melalui pungutan pajak.

Hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sudah banyak dikaji oleh berbagai peneliti. Ide bahwa belanja pemerintah dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi masih menjadi kontroversial. Beragam hasil penelitian tidak menunjukkan ketetapan arah hubungan diantara kedua variabel tersebut secara pasti, sehingga keragaman hasil penelitian tersebut memberikan ruang untuk dilakukan eksplorasi dengan penggunaan periode data, alat analisis dan objek negara atau daerah yang berbeda. Dogan dan Tang (2006) berupaya menentukan hubungan kausal antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dengan menerapkan metode *Johansen co-integrated* dan uji kausalitas *Granger*, didapatkan bahwa tidak ada hubungan kausal yang terjadi antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di tiga negara yang diteliti, sementara di Pilipina pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah, hubungan sebaliknya tidak terjadi. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Jiranyakul dan Brahmasrene (2007) membuktikan adanya pengaruh positif belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Thailand.

Hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di negara-negara OKI juga dilakukan Sudarsono (2010). Penelitian dengan rentang waktu 1970-2006 ini mengungkapkan temuannya bahwa pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Iran, Nigeria, dan Tunisia. Sedangkan, di beberapa negara lainnya (Aljazair, Burkina Faso, Benin, Indonesia, Libya, Malaysia, Maroko, dan Saudi Arabia) terjadi arah pengaruh yang sebaliknya. Wang, Peculea, dan Xu (2016), yang juga mengkaji hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Romania, menggunakan pendekatan ARDL (*auto Regression Distributed Lag*) dan uji *Bound* berdasar pada *Unrestricted Error Correction Model* untuk data periode 1991-2014. Dari kajian ini ditemukan hasil bahwa ada hubungan jangka



panjang antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, namun hubungan tersebut bersifat searah dari pertumbuhan ekonomi ke belanja pemerintah. Hasil ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah di Romania tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya, melainkan sebaliknya.

Sementara itu Gisore, dkk (2014) yang melakukan studi tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi di Afrika timur dengan fokus pengeluaran pemerintah bidang tertentu, yaitu pengeluaran bidang pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan pertanian. Dengan mengaplikasikan analisa *balanced panel fixed effect model* ditemukan bahwa pengeluaran kesehatan dan pertahanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pendidikan dan pertanian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula Ebong, dkk (2016) yang menganalisis dampak jangka pendek dan jangka panjang belanja modal bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria periode 1970-2012. Dengan menggunakan metode *Engel-Granger* dan *error correction model* (ECM) ditemukan hasil bahwa belanja modal bidang pendidikan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan belanja modal bidang kesehatan dan pertanian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Abdullah dan Rusdarti (2017) juga melakukan studi tentang belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk periode 1990-2015. Berdasarkan metode analisis regresi berganda, studi ini menemukan adanya pengaruh positif dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tiga negara tersebut. Sementara itu, fokus kajian mengenai kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih sedikit. Salah satu kajian tersebut dilakukan oleh Nurlina (2015). Nurlina menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2004-2013 dengan menggunakan pendekatan analisis *Ordinary Least Square* (OLS), dan ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran pemerintah.

Penelitian lain juga dilakukan pada tingkat regional di Indonesia (Gunarto, Sentri, & Said, 2018; Sijabat, 2017; MS, 2017; Anitasari, 2015). Studi yang dilakukan oleh Gunarto, Sentri, dan Said (2018) berfokus pada pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan, transportasi, dan sosial di 17 kabupaten dan kota di Sumatera (kabupaten dan kota yang mengalami pemekaran di tahun 1999). Dari pendekatan regresi panel yang dipakai, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah otonomi baru. Sebaliknya, pengeluaran untuk perumahan secara signifikan berpengaruh negatif, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pertanian dan transportasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah otonomi baru.

Berikutnya, Sijabat (2017) juga mengkaji dampak pengeluaran produktif terhadap pertumbuhan ekonomi di 25 provinsi di Indonesia sebelum desentralisasi fiskal (1994-1997) dan 33 provinsi setelah desentralisasi (2011-2015). Dengan analisis regresi panel, diungkapkan ada perbedaan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi antara sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. Saat sebelum desentralisasi fiskal, hanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pada kondisi setelah



desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, keamanan dan ketertiban, dan kesehatan yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh MS (2017) di Provinsi Jambi dalam periode 2010-2016. Metode regresi linier sederhana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pada pengeluaran pemerintah mendorong peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Demikian juga dengan Anitasari (2015) yang melakukan pengujian pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu periode 2001-2012. Anitasari yang mengaplikasikan regresi linier sederhana menemukan adanya pengaruh positif dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu, jika pemerintah menaikkan pengeluarannya sebesar 1 miliar rupiah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17% per tahun. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis penelitian, yaitu belanja pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain belanja pemerintah, pajak juga menjadi instrumen dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Folster dan Henrekson (2001) melakukan studi dengan sampel negara OECD yang kaya dan negara non-OECD periode 1970-1995 dan menggunakan alat analisis regresi panel. Studi ini mengungkapkan bahwa 10 persen peningkatan rasio pajak terhadap PDB akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen.

Studi lain dilakukan oleh Macek (2014), yang mengevaluasi dampak pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD tahun 2000-2011. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak perusahaan dan pajak penghasilan perorangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu Jalata (2014), dengan menggunakan regresi berganda, menemukan adanya hubungan positif antara pajak pertambahan nilai (PPN) dan pertumbuhan ekonomi di Ethiopia periode pengamatan tahun 2003-2012. Studi yang sama juga dilakukan oleh Adkisson dan Mohammed (2014). Dari analisis pada 50 negara bagian di Amerika periode 2004-2010 ditemukan bahwa struktur pajak berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek bahkan di masa resesi. Lebih spesifik, pada pertumbuhan 1 tahun, penurunan pajak penjualan meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,07 persen, sementara peningkatan pajak pendapatan perorangan mengurangi pertumbuhan sebesar 0,05. Selain itu, peralihan pendapatan dari ketergantungan pada pajak barang pribadi ke pajak properti memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode resesi yang hebat.

Berikutnya, Mdanat, dkk (2017) mengkaji tentang struktur pajak dan pertumbuhan di Jordan periode 1980-2015. Uji cointegrasi dan VECM yang diterapkan dalam penelitian ini menemukan bahwa pajak pendapatan, pajak perusahaan, dan pajak perorangan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, ada pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh Alkassabeh, dkk (2018), dengan menggunakan Autoregressive Distributive Lag (ARDL) untuk data periode 1970-2017 di Jordan. Paralel dengan hasil penelitian tersebut, Stoilova (2017) yang menerapkan regresi panel, juga menemukan bahwa struktur pajak yang terdiri dari pajak barang konsumsi, pajak penghasilan, dan pajak properti mendorong pertumbuhan ekonomi di 28 negara Uni Eropa periode 1996-2013.

Hubungan pajak dan pertumbuhan ekonomi juga dijabarkan oleh Acosta, dkk (2019). Acosta dkk mengkaji hubungan komposisi pajak dan pertumbuhan ekonomi selama periode 1970-2009 di 70 negara dalam beragam tingkat pendapatan (23 negara berpendapatan tinggi, 23 negara berpendapatan menengah, dan 24 negara berpendapatan rendah). Dari analisis regresi data panel, ditemukan bahwa meningkatkan



pajak konsumsi dan properti sambil mengurangi pajak penghasilan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lebih lanjut, di antara pajak penghasilan, ditemukan bahwa kontribusi jaminan sosial dan pajak penghasilan perorangan relatif cenderung memiliki hubungan negatif yang lebih kuat dengan pertumbuhan ekonomi daripada pajak penghasilan perusahaan.

Demikian pula Saragih (2018) yang menginvestigasi pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2013-2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Dari penjelasan ini dibuatlah hipotesis penelitian yaitu pajak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel terakhir, yaitu status pemekaran wilayah. Belum banyak penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Salah satunya, kajian yang dilakukan oleh Wibowo dan Muljarijadi (2014), yang mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah pemekaran di Indonesia yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya seperti Kota Banjar (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Humbang Hasundutan (Provinsi Sumatera Utara) dan Kabupaten Minahasa (Provinsi Sulawesi Utara). Kajian ini juga menjelaskan adanya permasalahan yang timbul sebagai akibat pemekaran. Buruknya kinerja pemekaran berakar dari permasalahan belum siapnya pemerintah baru dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, karena proses pembentukan pemerintahan yang memang prematur. Lebih lanjut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa daerah induk memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan PDRB per kapita daerah pemekaran. Namun demikian, kajian ini bersifat deskriptif, sehingga tidak bisa diuji dan belum bisa digeneralisir. Oleh sebab itu, variabel status pemekaran menjadi kontribusi penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini menguji pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penjelasan ini, hipotesis yang diangkat adalah pemekaran wilayah menurunkan pertumbuhan ekonomi.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian *eksplanatory* yang akan menguji hipotesis penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Sumatera (154 kabupaten dan kota) dengan periode pengamatan 6 tahun (2011-2016). Proksi pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai variabel dependen adalah PDRB kabupaten dan kota. Tiga variabel independen yang digunakan adalah total belanja pemerintah dan penerimaan pajak pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, serta *dummy* status pemekaran kabupaten dan kota. Penentuan pemekaran ini dilakukan sejak diberlakukannya UU 32/2004 tentang pemekaran wilayah. Data penelitian, yang berupa data sekunder, diperoleh dari BPS dan kementerian keuangan RI. Untuk menjawab tujuan penelitian dan menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi data panel. Model regresi data panel untuk penelitian ini adalah:

$$\ln PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 \ln BP_{it} + \beta_2 \ln PP_{it} + \beta_3 Dm_{it} + \delta \dots \dots \dots (1)$$

Penjelasan variabel dalam model adalah sebagai berikut: PDRB adalah produk domestik regional bruto, BP merupakan belanja total pemerintah, PP sebagai penerimaan pajak daerah, dan Dm yaitu *dummy* pemekaran. Nilai *dummy* =1 adalah untuk kabupaten dan kota mekar, yang menjadi daerah otonom baru. Dengan demikian, nilai *dummy* = 0 adalah untuk kategori lainnya (kabupaten dan kota yang tidak mekar).



Dari tiga model data panel yang bisa dihasilkan, penelitian ini akan memilih dan menggunakan model regresi data panel yang terbaik berdasarkan hasil *Chow test* dan *Hausman test* (Baltagi, 2005). Selanjutnya uji hipotesis, dengan uji F dan uji t, dilakukan pada model regresi data panel yang terbaik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan $\alpha = 5\%$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode regresi data panel. Namun, sebelum menjawab tujuan penelitian ini, terlebih dahulu disajikan deskripsi variabel yang diteliti. Pertama akan ditampilkan kabupaten dan kota dengan nilai tertinggi dan terendah di setiap provinsi dan di Sumatera selama tahun 2011-2016 (Tabel 1).

Tabel 1. Posisi kabupaten dan kota dengan nilai tertinggi dan terendah di Provinsi dan Sumatera berdasarkan PDRB, Belanja pemerintah, dan pajak daerah.

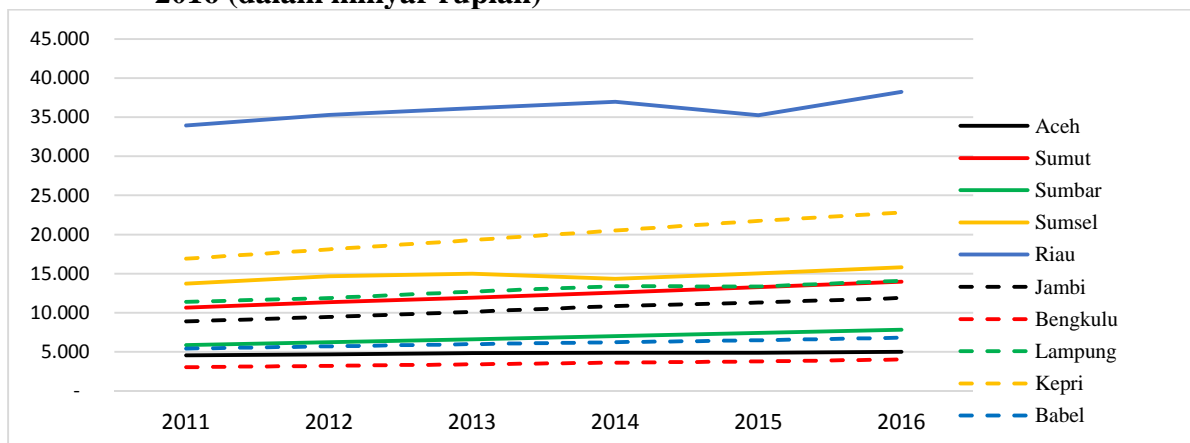
Provinsi	PDRB		Belanja		Pajak	
	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	terendah	tertinggi	terendah
Aceh	Aceh Utara	Sabang	Aceh Utara	Subussalam	Banda Aceh	Bener Meriah
Sumut	Medan	Pakpak Bharat	Medan	Nias Barat	Medan	Nias Utara
Sumbar	Padang	Padang Panjang	Padang	Padang Panjang	Padang	Kep Mentawai
Sumsel	Palembang	Pagar Alam	Musi Banyuasin	Pagar Alam	Palembang	OKU Selatan
Babel	Bangka Barat	Belitung	Bangka	Bangka Selatan	Belitung	Bangka Selatan
Riau	Bengkalis	Kep Meranti	Bengkalis	Dumai	Pekan Baru	Kep Meranti
Kepri	Batam	Lingga	Batam	Lingga	Batam	Natuna
Jambi	Kota Jambi	Sungai Penuh	Kota Jambi	Sungai Penuh	Kota Jambi	Sungai Penuh
Bengkulu	Kota Bengkulu	Lebong	Kota Bengkulu	Kaur	Kota Bengkulu	Bengkulu Tengah
Lampung	Lampung Tengah	Metro/Pesisir Barat	Lampung Tengah	Tulang Bawang Barat	Bandar Lampung	Mesuji

Sumber: data diolah dari BPS dan Kementerian Keuangan RI.

Setelah diketahui kabupaten dan kota mana yang memperoleh PDRB, belanja pemerintah, pajak dan jumlah penduduk tertinggi dan terendah di setiap provinsi, selanjutnya akan dijelaskan rata-rata PDRB, belanja, pajak dan daerah pemekaran di setiap provinsi. Pertama akan disajikan perkembangan rata-rata PDRB kabupaten dan kota setiap provinsi periode 2011-2016 dalam Gambar 2.



Gambar 2. PDRB rata-rata Kabupaten dan Kota di setiap Provinsi tahun 2011-2016 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Grafik dibuat oleh peneliti berdasarkan data BPS

Selama tahun 2011-2016, secara rata-rata, PDRB kabupaten dan kota tertinggi di Sumatera dimiliki oleh kabupaten dan kota di Provinsi Riau; yang mencapai Rp33,9 triliun di tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp38,2 triliun di tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi kabupaten rata-rata di Provinsi Riau tumbuh sebesar 12,6% selama 5 tahun. Secara rata-rata kabupaten dan kota di Provinsi Riau memiliki PDRB tertinggi dibandingkan provinsi lain karena wilayah di Provinsi Riau kaya dengan sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas yang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB wilayah ini.

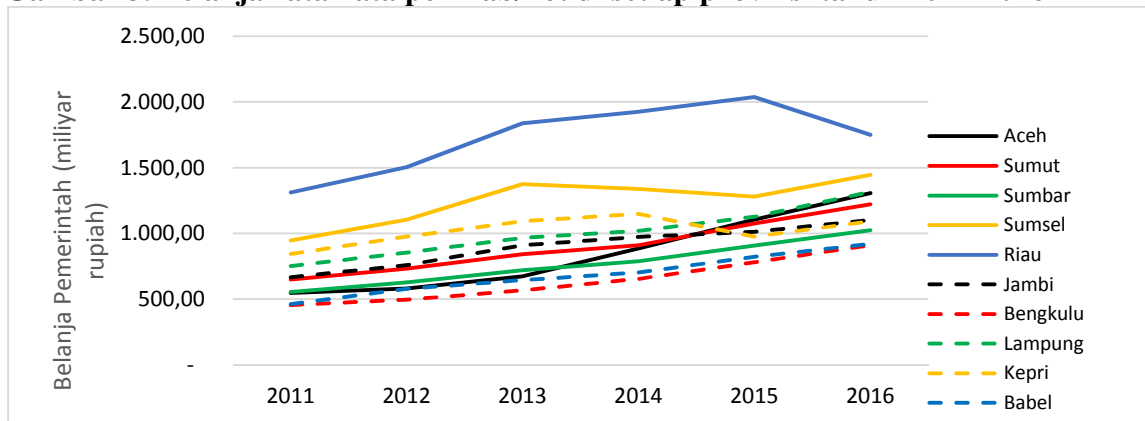
Sementara itu, PDRB kabupaten dan kota rata-rata terendah di Sumatera berada di Provinsi Bengkulu. Dengan rata-rata PDRB kabupaten dan kota sebesar Rp3,02 triliun di tahun 2011 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 32,6% selama 6 tahun, maka PDRB rata-rata kabupaten dan kota di Sumatera menjadi Rp4,005 triliun di tahun 2016. Secara rata-rata kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu memiliki PDRB terendah di bandingkan provinsi lain karena perekonomian di provinsi ini didominasi oleh sektor pertanian, masih sangat sedikit industri besar di provinsi ini, sehingga nilai tambah dalam perekonomian masih rendah. Selanjutnya, dari sepuluh provinsi, urutan nilai PDRB kabupaten dan kota rata-rata dari tertinggi sampai terendah pada delapan provinsi lainnya ditunjukkan dalam Gambar 2.

Setelah diuraikan perkembangan PDRB kabupaten dan kota, maka variabel berikutnya yang dijelaskan adalah belanja pemerintah kabupaten dan kota. Penjelasan belanja pemerintah dianalisis dengan menggunakan belanja rata-rata di setiap provinsi ditampilkan dalam Gambar 3. Berdasarkan gambar 3, terlihat Provinsi Riau memiliki belanja pemerintah rata-rata tertinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota di provinsi lain selama kurun waktu 2011-2016. Belanja rata-rata pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau mencapai Rp1,31 triliun di tahun 2011, dan meningkat menjadi Rp1,75 triliun di tahun 2016.

Selanjutnya provinsi dengan belanja rata-rata pemerintah kabupaten dan kota terendah adalah Bengkulu, yang disusul oleh Bangka Belitung. Belanja rata-rata pemerintah kabupaten/dkota di Provinsi Bengkulu sebesar Rp456 miliar pada tahun 2011, terus meningkat menjadi Rp909,6 miliar di tahun 2016.



Gambar 3. Belanja rata-rata pemkab/kot di setiap provinsi tahun 2011-2016

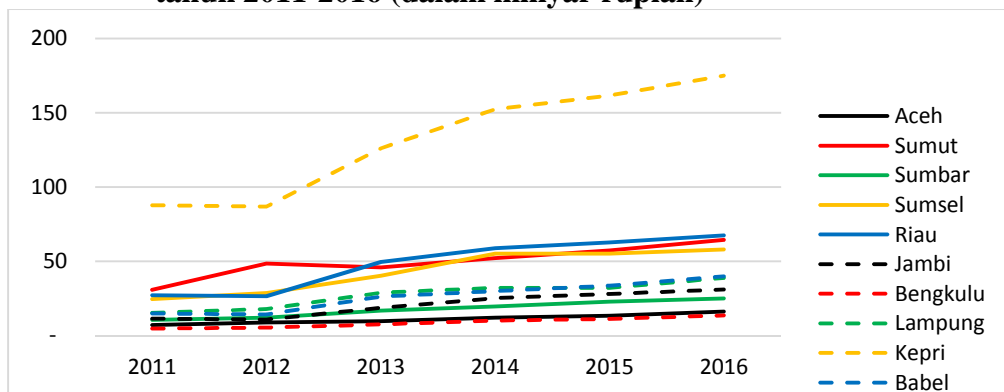


Sumber: Grafik dibuat oleh peneliti berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI

Dari sepuluh provinsi, ada pemerintah kabupaten dan kota yang mengalami fluktuasi dalam belanja pemerintah. Di Provinsi Riau, belanja rata-rata pemerintah kabupaten dan kotanya tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013-2015. Fluktuasi belanja rata-rata dari tahun ke tahun ini juga dialami oleh kabupaten dan kota di provinsi lain seperti di Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. Dengan demikian, belanja rata-rata pemerintah kabupaten dan kota terus mengalami peningkatan setiap tahun hanya di tujuh provinsi lainnya. Bahkan ada belanja rata-rata pemerintah kabupaten dan kota yang meningkat pesat pada satu provinsi (dibandingkan provinsi lain), yaitu di Provinsi Aceh yang mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2013.

Kemudian disajikan Gambar 4 tentang pajak daerah, yaitu pajak kabupaten dan kota, yang dijelaskan secara rata-rata di setiap provinsi. Pajak daerah rata-rata tertinggi dihasilkan kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan tren yang terus meningkat sejak tahun 2012. Sebaliknya, kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu memiliki pajak rata-rata terendah, bahkan peningkatan pajak di provinsi ini sangat lambat. Hal ini menunjukkan perkembangan ekonomi kabupaten dan kota yang menjadi objek pajak lokal belum berkembang pesat. Namun demikian, perkembangan penerimaan pajak rata-rata yang lambat ini tidak terjadi hanya di Provinsi Bengkulu. Perkembangan penerimaan pajak yang lambat juga dirasakan oleh kabupaten dan kota di provinsi Bangka Belitung, Jambi, Aceh dan Sumatera Barat.

Gambar 4. Pajak rata-rata kabupaten/kota di setiap provinsi tahun 2011-2016 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Grafik dibuat oleh peneliti berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI



Berikutnya dijelaskan variabel *dummy* pemekaran. Variabel *dummy* pemekaran bernilai 1 untuk kabupaten dan kota yang baru menjadi daerah otonom sejak tahun 2004. Dengan demikian, sejak tahun 2004, muncul 22 kabupaten dan kota baru di Sumatera, yang berada di Provinsi Sumatera Utara (8), Lampung (5), Sumatera Selatan (3), Aceh (2), Riau (1), Jambi (1), Kepri (1), dan Bengkulu (1). Dengan kata lain, dua provinsi yang tidak mengalami pemekaran selama periode penelitian adalah Sumatera Barat dan Bangka Belitung.

Setelah diuraikan deskripsi PDRB, belanja pemerintah, pajak, dan kabupaten dan kota yang mekar, berikutnya akan dijelaskan pengolahan data dengan metode regresi data panel. Data panel yang digunakan adalah 154 kabupaten dan kota dalam periode 2011-2016. Sebelum dianalisis model regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan penentuan model terbaik. Penentuan model terbaik dilakukan dengan menggunakan *chow test* dan *Hausman test*.

Berdasarkan *chow test*, diketahui nilai *Cross-section Chi-square* sebesar 1.251,46 dengan probabilitas 0,000, yang berarti probabilitas < 5%, sehingga H_0 ditolak; dengan demikian *fixed effect model* (FEM) dinilai paling baik. Selanjutnya dilakukan *Hausman test* untuk mengetahui model *fixed effect* atau *random effect* yang terbaik. Berdasarkan *Hausman test*, diketahui nilai *chi-square* pada *cross-section random* adalah 269,06 dengan probabilitas 0,000, yang berarti probabilitas < 5%. Maka H_0 ditolak, oleh karena itu, model terbaik adalah *fixed effect model*. Selanjutnya pengujian hipotesis dengan *F test* dan *t-test* dilakukan berdasarkan *Fixed Effect model*.

Dari Tabel 2 diketahui probabilitas untuk *F test* adalah 0,000, hal ini berarti probabilitas < 5%, oleh karena itu H_0 ditolak. Dengan demikian, belanja pemerintah, pajak dan *dummy* mekar secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera. Selanjutnya, berdasarkan *t-test*, Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki probabilitas < 5%, sehingga dapat dikatakan secara parsial, ketiga variabel independen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota.

Tabel 2. Hasil Pengolahan data penelitian

Constant	lnBP	lnPP	D _{mekar}
15,99179	0,336466	0,188747	-0,503892
(1,203290)	(0,055744)	(0,026054)	(0,087387)
***	***	***	***
R ² = 0,921379			
F stat = 57,31109			
Prob = 0,000000			

Catatan: *** menunjukkan signifikan pada $\alpha = 1\%$

Sumber: Hasil penelitian

Variabel independen pertama, yaitu belanja pemerintah, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PDRB. Dengan koefisien regresi 0,336466, diartikan bahwa peningkatan 1% belanja pemerintah, terjadi pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera sebesar 0,33%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak elastis terhadap peningkatan belanja pemerintah. Demikian juga untuk variabel pajak, secara parsial ada pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan.



Dengan koefisien regresi 0,188747, ekonomi tumbuh tidak elastis terhadap peningkatan pajak. Dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 1% terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,188% di kabupaten dan kota di Sumatera.

Sementara itu, untuk variabel *dummy*, secara parsial ada pengaruh negatif yang signifikan variabel *dummy* pemekaran terhadap pertumbuhan Sseperti telah dijelaskan sebelumnya, nilai D=1 adalah untuk kabupaten dan kota yang menjadi daerah otonom baru sejak 2004. Dengan demikian, dengan koefisien variabel *dummy* mekar -0,503892 menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kabupaten dan kota yang menjadi daerah otonom setelah tahun 2004.

Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya pengaruh positif belanja pemerintah terhadap PDRB kabupaten dan kota di Sumatera. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura (Abdullah & Rusdarti, 2017), di 25 provinsi di Indonesia (Sijabat, 2017), di Afrika Timur (Gisore, dkk. 2014), dan negara OKI (Sudarsono, 2010). Dengan menggunakan metode regresi data panel, yang juga digunakan dalam penelitian ini, keempat penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif belanja pemerintah secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah merupakan cerminan program dan aktivitas pemerintah. Dalam mengalokasikan belanja, pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera, terlebih dahulu membuat perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah menerapkan *money follows function*. Dalam perencanaan pembangunan, tentu pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perencanaan pembangunan yang baik oleh daerah akan membantu pemerintah daerah tersebut untuk mengalokasikan belanja dengan tepat, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Seperti diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini, yaitu adanya pengaruh positif belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, berimplikasi pada upaya pemerintah daerah di Sumatera untuk semakin fokus pada perencanaan pembangunan yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan potensi dan kebutuhan *existing sector* agar dunia usaha di daerah bisa semakin berkembang. Dengan perencanaan yang tepat, tentu saja pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja dengan lebih baik dan tepat sasaran. Alokasi belanja pemerintah untuk penguatan UMKM, koperasi, peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lainnya yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera.

Demikian juga penelitian ini menemukan adanya pengaruh pajak secara positif terhadap PDRB kabupaten dan kota di Sumatera. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan di negara uni eropa (Stoilova, 2017), negara bagian di Amerika (Adkisson & Mohammed, 2014), negara OECD (Macek, 2014), serta di negara OECD dan non-OECD (Folster & Henrekson, 2001). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga sama dengan keempat penelitian tersebut, yaitu regresi data panel.

Di Indonesia, ada 11 jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU 28/2009, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam & batuan, parkir, air tanah, sarang burung wallet, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, sehingga Pem kabupaten dan kota diberi peluang untuk menggali



potensi pajak di luar yang ditentukan UU tersebut namun tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha agar bisa terus berkembang.

Penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Bagi pemerintah daerah, sumber penerimaan pemerintah adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pajak merupakan salah satu pendapatan asli daerah, yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pajak mendorong peningkatan akumulasi modal pemerintah yang disalurkan pada investasi di berbagai bidang yang tentunya untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta program kesejahteraan lainnya. Penyediaan barang publik ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, pajak yang diperoleh sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera belum mencukupi untuk membiayai pembangunan. Dengan kata lain, rasio penerimaan pajak masih rendah dibandingkan rasio dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah. Adanya pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mengandung implikasi bahwa pemerintah kabupaten dan kota seharusnya berupaya untuk mengoptimal penerimaan pajak berdasarkan UU 28/2009. Rendahnya rasio penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa hal, seperti masih belum optimalnya pemungutan pajak dari wajib pajak yang ada, serta belum terdatanya semua wajib pajak yang memenuhi kriteria. Mengingat bahwa pajak kabupaten dan kota dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, maka implikasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota berupaya melakukan ekstensifikasi pajak. Hal ini masih dimungkinkan karena sampai saat ini total wajib pajak kabupaten dan kota yang sudah membayar pajak belum optimal. Pemerintah daerah bisa bekerja secara proaktif untuk mencari wajib pajak yang belum terdata. Jika ini berhasil dilakukan tentu saja penerimaan pajak kabupaten dan kota bisa meningkat yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, untuk variabel ketiga, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang baru mekar setelah tahun 2004 lebih rendah daripada kabupaten dan kota yang sudah ada sebelum tahun 2004. Salah satu perbedaan antara kabupaten dan kota yang baru mekar setelah tahun 2004 dengan kabupaten dan kota yang sudah lahir sebelum tahun 2004 adalah kelengkapan infrastruktur yang telah dibangun baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Kabupaten dan kota yang baru mekar dalam periode penelitian masih dalam tahap pembangunan, masih dalam kondisi melengkapi infrastruktur seperti jalan, telekomunikasi, perbankan dan keuangan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Namun tidak demikian kondisi di kabupaten dan kota yang sudah ada sebelum 2004. Tentu saja infrastruktur yang ada mendukung perkembangan dunia usaha. Kabupaten dan kota yang baru mekar dengan dukungan infrastruktur yang belum lengkap berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Implikasi hasil penelitian ini pemerintah pusat harus sangat berhati-hati memberikan izin pendirian kabupaten dan kota yang baru, karena dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi suatu kabupaten/kota untuk menyiapkan infrastruktur pendukung termasuk regulasi yang mendukung dunia usaha. Namun demikian, sejak tahun 2014, pemerintah pusat telah melakukan moratorium pemekaran wilayah. Sehingga diharapkan kabupaten dan kota yang sudah terlanjur mekar berupaya keras untuk meningkatkan pembangunan dan mengembangkan perekonomian wilayahnya.



SIMPULAN

Berdasarkan metode analisis regresi data panel yang digunakan pada data 154 kabupaten dan kota di Sumatera selama tahun 2011-2016, ditemukan adanya pengaruh positif yang signifikan belanja pemerintah dan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota yang mekar setelah tahun 2004 lebih rendah daripada kabupaten dan kota yang sudah ada sebelum tahun 2004. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah membuat perencanaan pembangunan yang tepat dan mengalokasikan belanja berdasarkan perencanaan tersebut. Selain itu diharapkan pemerintah daerah melakukan ekstensifikasi pajak. Kedua hal ini memungkinkan untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk pemekaran wilayah, seharusnya setiap wilayah tidak mengalami pemekaran lebih lanjut karena kebijakan ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengklasifikasian belanja pemerintah berdasarkan fungsinya, apakah fungsi ekonomi, pendidikan atau lainnya, sehingga hasil penelitian ini tidak mampu melihat alokasi belanja pemerintah atas fungsi yang bagaimana yang mampu mendorong tumbuhnya perekonomian. Untuk itu rekomendasi penelitian lanjutan adalah menggunakan proksi belanja pemerintah menurut fungsinya agar diperoleh alokasi belanja pada fungsi apa yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mahmoud Ahmed., & Rusdarti. (2017). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia, and Singapore. *Journal of Economic Education*, 6(1), 11-18. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec/article/view/14396>
- Acosta-Ormaechea, Santiago., Sola, Sergio., & Yoo, Jiae. (2019). Tax Composition and Growth: A Broad Cross-country Perspective. *Germany Economic Review*, 20 (4), e70-e106. <https://doi.org/10.1111/geer.12156>
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah edisi pertama*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Adkisson, Richard V., & Mohammed, Mikidadu. (2014). Tax Structure and State Economic Growth during the Great Recession. *The Social Science Journal*, 51, 79-89. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.009>
- Alkasasbeh, Omar Mohammad Abad., Haron, Nazatul Faizah., & Abueid, Ali Ibrahim Saleem. (2018). The Impact of Government Expenditures, Taxes On Economic Growth in Jordan. *American Based Research Journal*, 7(2), 32-38. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330752992_The_Impact_of_Government_Expenditures_Taxes_On_Economic_Growth_in_Jordan
- Anitasari, Merri., & Soleh, Ahmad. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3 (2), 117-127. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i2.139>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric analysis of panel data 3rd ed.* Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Barro, R. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, 98 (5), S103-S125. <https://doi.org/10.1086/261726>



- Booth, Philip. (2016). *Taxation, Government Spending and Economic Growth*, London, IEA (Institute of Economic Affairs).
Retrieved from <https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Tax-Growth-PDF.pdf>
- Dogan, E., dan Tang, T. C. (2006). Government Expenditure and National Income: Causality Tests for Five South East Asian Countries. *International Business and Economics Research Journal*, 5 (10), 49-58.
<https://doi.org/10.19030/iber.v5i10.3516>
- Ebong, Friday., Ogwumike, Fidelis., Udongwo, Udeme., dan Ayodele, Olumide. (2016). Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Analysis. *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, 3 (1), 113-121.
<https://doi.org/10.20448/journal.501/2016.3.1/501.1.113.121>
- Folster, Stefan., dan Henrekson, Magnus. (2001). Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries. *European Economic Review*, 45,1501-1520.
[https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(00\)00083-0](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(00)00083-0)
- Gisore, Naftaly., Kiprop, Symon., Kalio, Aquilars., dan Ochieng, James. (2014). Effect of Government Expenditure on Economic Growth in East Africa: A Disaggregated Model. *European Journal of Business and Social Sciences*, 3 (8), 289-304. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/31a8/ef8290e5ef0306fd28ebb364268a558df9cb.pdf>
- Gunarto, Toto., Sentri, Ahmad., and Said Muhammad. (2018). Local Government Expenditures and Economic Growth in a New Autonomous in Indonesia. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22 (4), 1-16.
Retrieved from <https://www.abacademies.org/journals/month-august-year-2018-vol-22-issue-4-journal-aafs-j-past-issue.html>
- Ighodaro, Clement A. U., and Oriakhi, Dickson E. (2010). Expenditure and Economic Growth Follow Wagner's Law in Nigeria?. *Annals of the university of petrosani, economics*, 10 (2),185-198.
<http://upet.ro/annals/economics/pdf/2010/20100217.pdf>
- Jiranyakul, K., dan Brahmasrene, T. (2007). The Relationship between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand. *Journal of Economics and Economic Education Research*, 8 (1), 93-102. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/271020370_The_Relationship_Between_Government_Expenditures_and_Economic_Growth_in_Thailand
- Jalata, Dasalegn Mosissa. (2014). The Role of Value Added Tax on Economic Growth of Ethiopia. *Science, Technology and Arts Research Journal*, 3(1), 156-161.
<http://dx.doi.org/10.4314/star.v3i1.26>
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta :UPP YKPN.
- Mcnabb, Kyle. (2018). Tax Structures and Economic Growth: New Evidence From The Government Revenue Dataset. *Journal of International Development*, 30, 173-205. <https://doi.org/10.1002/jid.3345>
- Mendoza E, Milesi-Ferretti G, and Asea P. (1997). On the Ineffectiveness of Tax Policy in Altering Long-Run Growth: Harberger's Superneutrality Conjecture. *Journal of Public Economics*, 66 (1), 99-126. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(97\)00011-X](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00011-X)



- MS, M. Zahari. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, 1(1), 180-196.
<http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18>
- Myles, Gareth D. (2000). Taxation and Economic Growth. *Fiscal Studies*, 21 (1), 141-168.
<https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2000.tb00583.x>
- Nurlina. (2015). The Effect of Government Expenditures on Indonesia Economic Growth. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 18 (1), 1-14.
<http://dx.doi.org/10.14414/jebav.v18i1.377>
- Ogundipe, AA., & Oluwatobi, S. (2013). Government Spending and Economic Growth in Nigeria: Evidence from Disaggregated Analysis. *Journal of Business Management and Applied Economics*, 2 (4), 1-10.
Retrieved from <http://jbmae.scientificpapers.org/government-spending-and-economic-growth-in-nigeria-evidence-from-disaggregated-analysis/>
- Romer, P. M. (1990). Endogeneous Technical Change. *Journal of Political Economy*, 98, S71-S102. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/2937632>
- Sijabat, Rosdiana. (2017). Do Productive Government Expenditures Affect Economic Growth? Evidence from Provincial Governments across Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan (Journal of Government & Politics)*, 18 (1), 1-47.
Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/2662>
- Solow, R. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Sudarsono, Heri. (2010). The Relationship Between Economic Growth and Government Spending: A Case Study of OIC Countries. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 149-159. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i2.322>
- Suparmoko. (2013). *Keuangan Negara: Dalam teori dan Praktik*. Yogyakarta : BPFE.
- Swan, T. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. *The Economic Record*, 32(2), 334-361. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x>
- Todaro, Micheal P., and Smith, Stephen C. (2015). *Economic Development 12th Edition*. London: Pearson.
- Wang, Lingxio., Peculea A.D., Xu, Handuo. (2016). The Relationship Between Public Expenditure and Economic Growth in Romania: Does it Obey Wagner's or Keynes's Law?. *Theoretical and Applied Economics*, 3 (608), 41-52.
Retrieved from <http://www.ectap.ro/articol.php?id=1197&rid=124>
- Wibowo, Kodrat., Muljarijadi, Bagdja. (2014). *Reformulasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Kapabilitas Fiskal Kabupaten Belitung Timur*. Pusat Kajian Hubungan Daerah Wilayah Barat, Setjen DPD-RI. Bekerjasama dengan Prodi MET FEB Unpad.
http://www.academia.edu/19226920/Reformulasi_Pembentukan_Daerah_Otonomi_Baru_Studi_Kasus_Kapabilitas_Fiskal_di_Kabupaten_Belitung_Timur_Propinsi_Bangka_Belitung



